

PERANAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN PONOROGO

Andri Ratnasari
Drs. H. Kirwani SE, MM

ABSTRACT

Small and medium industries sector is a sector that has a variety of important roles in the economy. Among the variety of roles, most notably its role in labor absorption. In Ponorogo Regency number of labor absorption by small and medium industries continues to increased along increases in the number of small and medium industrial unit. However, labor absorption growth of small and medium industries are not as fast as the growth of the number of its units. Beside its, working labor has decreased over the last few years. Therefore in doing research to measure what extent the role of the small and medium industries in the labor absorption in Ponorogo Regency. In this research, data analysis technique used is the descriptive statistical analysis by counting the number of people working in small and medium industries divided by the total number of labor working in Ponorogo Regency. Results of the research is small and medium industries have a major role in labor absorption in Ponorogo. Small and medium industries sector is a potential sector that will boost labor absorption in Ponorogo.

Keyword : Small and Medium Industries, Small Industries, Medium Industries, Manpower, and Labor Absorption

ABSTRAK

Sektor industri kecil menengah merupakan sektor yang memiliki berbagai peran penting dalam perekonomian. Diantara berbagai peran tersebut, yang paling menonjol adalah perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Di Kabupaten Ponorogo jumlah penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil menengah terus meningkat seiring peningkatan jumlah unit usaha industri kecil menengah. Namun pertumbuhan penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah tidak secepat pertumbuhan jumlah unit usahanya. Selain itu jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu di lakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan industri kecil menengah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan cara menghitung jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri kecil menengah dibagi dengan total jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian adalah industri kecil menengah memiliki peranan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di kabupaten Ponorogo. Sektor industri kecil menengah merupakan sektor potensial yang akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci : Indutri Kecil Menengah, Industri Kecil, Industri Menengah, Tenaga Kerja, dan Penyerapan Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang dikembangkan di Indonesia sebagai sektor penggerak kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peran sektor industri

dalam perekonomian dinilai sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data di Badan pusat penelitian (BPS) pada tahun 2012, sektor industri mampu menyerap tenaga

kerja sebanyak 15,37 juta jiwa, dari 118 juta jiwa angkatan kerja yang tersedia. Dari total penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri, sekitar 61,57 % dari penyerapan tenaga kerja tersebut dilakukan oleh Industri Kecil Menengah (IKM). Sedangkan di Jawa Timur penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri juga didominasi oleh sektor IKM, dari jumlah total penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,03 juta jiwa, IKM menyerap sekitar 2,75 juta atau sekitar 91 persen dari jumlah total penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja IKM lebih unggul karena sektor Industri Kecil Menengah (IKM) adalah sub sektor yang mengelola jenis-jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga, dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Sub sektor IKM merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah yang bergerak dalam berbagai sektor ekonomi. Sehingga jumlah IKM sangat banyak dan tersebar di semua sektor ekonomi dan diseluruh wilayah Indonesia. Karena tersebar diberbagai sektor dan wilayah maka sektor IKM dapat menyerap banyak tenaga kerja secara merata di semua wilayah. Jenis IKM yang berkembang pun beraneka ragam karena keanekaragaman budaya Indonesia.

Selain itu, Industri Kecil Menengah (IKM) adalah usaha yang mempunyai ketahanan akan krisis ekonomi. Hal ini terbukti saat terjadi krisis tahun 1998, IKM bisa bertahan dari keterpurukan yang dialami usaha besar lainnya. Bahkan jumlah IKM semakin meningkat paska terjadinya krisis. Faktor pendukung IKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah: (1) sebagian besar IKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, (2) sebagian besar IKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Sehingga pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap IKM, (3) Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Sehingga pengangguran yang ada melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah IKM semakin meningkat (Partomo dan Soejodono, 2004).

Peran sektor Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, membuat sektor ini lebih banyak berkembang di daerah pedesaan seperti Kabupaten Ponorogo, yang mayoritas penduduknya memiliki ekonomi

menengah kebawah. Dengan kondisi ekonomi yang lemah, masyarakat Ponorogo berusaha mendapatkan pendapatan dengan melakukan berbagai kegiatan usaha berskala kecil atau menengah yang tidak membutuhkan banyak modal. Sedangkan untuk membentuk usaha dalam skala besar, masyarakat tidak memiliki modal yang cukup. Hal inilah yang membuat masyarakat pedesaan lebih mengembangkan sektor IKM daripada membentuk industri besar. Selain itu, Industri Kecil Menengah (IKM) mampu menyerap tenaga kerja dengan kualitas pendidikan rendah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Meskipun pengembangan industri-industri besar dapat menyerap tenaga kerja, tetapi untuk memasuki pasar tenaga kerja sektor industri besar, diperlukan keterampilan-keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sedangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang menggunakan teknologi sederhana memungkinkan masyarakat dengan pendidikan rendah untuk melakukan kegiatannya. Dengan demikian, tenaga yang tidak terserap oleh usaha besar dan sektor ekonomi lainnya mampu diserap oleh IKM.

Berdasarkan hasil pengamatan, sektor IKM yang berkembang di Kabupaten Ponorogo sangat beraneka ragam, mulai

dari kerajinan REOG, kerajinan alat dapur, berbagai pernak pernik cinderamata, kompor, makanan olahan khas Ponorogo, mebel, hingga bahan-bahan bangunan seperti batu bata merah dan genteng. Dari hasil pengamatan tersebut tersebut diketahui jika masyarakat mengembangkan IKM layaknya sebuah komunitas, dimana dalam satu daerah masyarakat membentuk IKM yang memproduksi jenis barang yang sama atau seragam. Sehingga setiap daerah menjadi sentra IKM untuk jenis barang tertentu. Hampir setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo memiliki sentra IKM, bahkan ada beberapa kecamatan yang memiliki lebih dari satu sentra IKM. Misalnya Kecamatan Jetis yang menjadi sentra IKM Jenang Mirah dan makanan olahan khas Ponorogo, Desa Paju di Kecamatan Ponorogo yang menjadi sentra industri seng dan gamelan, serta Desa Sukorejo yang menjadi sentra industri gethuk nggolan dan sentra industri tahu. Selain sentra-sentra industri tersebut masih banyak industri kecil berupa industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Industri rumah tangga yang paling banyak jumlahnya adalah industri kerajinan dan makanan olahan, misalnya industri kerajinan tikar, industri kerajinan anyaman bambu, industri tempe mentah, industri tempe kripi, serta industri krupuk. Industri-industri tersebut merupakan

industri dalam skala kecil yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Menurut pengamatan yang telah dilakukan, lebih dari 75% industri rumah tangga tersebut tidak memiliki surat ijin usaha dan termasuk dalam sektor non formal.

Jumlah IKM di Kabupaten Ponorogo terus meningkat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya merk-merk baru yang muncul untuk satu jenis barang. Berdasarkan keterangan dari para pemilik IKM, jumlah IKM di daerahnya semakin banyak jumlahnya, baik dengan produksi sejenis atau dengan produksi jenis barang lainnya. Di Kabupaten Ponorogo pertumbuhan jumlah unit usaha IKM selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerjanya. Namun ternyata peningkatan jumlah unit usaha IKM yang besar, tidak diimbangi dengan penambahan penyerapan tenaga kerja yang besar pula. Penyerapan tenaga kerja IKM seharusnya dapat mencapai jumlah yang lebih besar mengingat jumlah unit usahanya yang besar dan terus meningkat. Selanjutnya meskipun jumlah penyerapan tenaga kerja IKM terus meningkat, jumlah penambahan penyerapan tenaga kerja IKM cenderung mengalami penurunan pada periode 2009-2011. Selain permasalahan tersebut, penyerapan tenaga kerja IKM di Kabupaten Ponorogo ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja secara

maksimal sehingga masih tercipta pengangguran. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja turun, namun pada tahun yang sama jumlah pengangguran justru meningkat. Jika berkurangnya angkatan kerja tidak mengurangi jumlah pengangguran melainkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal ini menunjukkan jika jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja turun lebih besar dari jumlah penurunan angkatan kerja itu sendiri sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat.

Berkaitan dengan uraian tentang berbagai peranan IKM dalam perekonomian diatas serta berbagai permasalahan IKM di Kabupaten Ponorogo, maka akan dilakukan penelitian tentang peranannya di Kabupaten Ponorogo dengan judul **“Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo”**.

Rumusan Masalah

Bagaimana peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai upaya seleksi sektor yang mendukung

perluasan kesempatan kerja di kabupaten Ponorogo

KAJIAN TEORI

Industri Kecil Dan Menengah (IKM)

Definisi tentang Industri Kecil Menengah (IKM) sangat beragam di Indonesia, keberagaman ini disebabkan oleh pendefinisian IKM oleh pihak-pihak atau lembaga pemerintahan yang menggunakan konsep yang berbeda dalam mendefinisikan IKM.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2007:5) kedua industri ini merupakan usaha rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu kegiatan produksi. Industri kecil dan industri menengah dapat dibedakan dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan suatu produksi dan mengabaikan jumlah modal yang diperlukan serta omset yang diperoleh oleh kegiatan usaha. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dianggap bisa menjelaskan bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan hanya kegiatan yang sederhana dan menghasilkan output yang terbatas. Sedangkan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih rumit dan menghasilkan output yang lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan jika

jumlah tenaga kerja dapat menggambarkan skala usaha yang sedang dilakukan.

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (dalam Prasetyo, 2008), industri kecil adalah suatu usaha dalam bentuk industri yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang memiliki aset < Rp 200 juta atau omset Rp 1 milyar, bersifat industri keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri. Kemudian industri menengah adalah industri yang sedikit lebih besar dari industri kecil, industri menengah merupakan industri kecil yang berkembang sehingga memiliki aset < Rp 5 milyar untuk kegiatan industri, aset < Rp 600 juta untuk kegiatan lainnya.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam RIP-IKM (2002-2004) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang. Sedangkan Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk

diperdagangkan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari 1 milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan jika definisi Industri Kecil Menengah (IKM) tidak selalu sama, tergantung pada konsep yang digunakan untuk mendefinisikannya. Menurut Tohar (2007: 1) ada beberapa aspek yang digunakan dalam konsep definisi usaha kecil tersebut, yaitu 1) kepemilikan, 2) modal dan aset, 3) serta jumlah tenaga kerja.

Tenaga Kerja

Menurut Djojohadikusumo (dalam Misbach, 2011) tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Untuk menggolongkan penduduk dalam golongan tenaga kerja atau bukan tenaga kerja, dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Semua penduduk yang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas bekerja dapat digolongkan dalam kelompok tenaga kerja. Menurut Simanjuntak (2005: 2) selain penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, serta penduduk yang sedang mencari pekerjaan, maka penduduk yang

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga pun termasuk dalam kelompok tenaga kerja karena mampu melakukan suatu pekerjaan. Penduduk bersekolah dan mengurus rumah tangga walaupun tidak sedang bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu bekerja dan sewaktu-waktu dapat untuk ikut bekerja. Sehingga mereka dapat digolongkan kedalam kelompok tenaga kerja karena memang memiliki kemampuan untuk bekerja serta memiliki potensi untuk bekerja disaat mereka ingin melakukannya.

Mulyadi (2008: 59) menyatakan bahwa tenaga dapat kerja didefinisikan sebagai semua penduduk dalam usia kerja (berusia 15 – 64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Usia kerja yang dimaksud adalah usia dimana umumnya seseorang sudah mampu atau masih mampu melakukan suatu pekerjaan.

Sedangkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian ini menjelaskan bagaimana tenaga kerja selalu berperan

dalam setiap kegiatan produksi barang atau jasa baik itu produksi dalam jumlah kecil ataupun besar, untuk kebutuhan sendiri ataupun orang banyak.

Selanjutnya Sumarsono (2009: 2) menyebutkan bahwa tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja yang dimaksud adalah mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya, secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Sehingga orang yang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah total penduduk dalam usia produktif yang dapat melakukan suatu pekerjaan baik yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang tidak bekerja dan melakukan kegiatan selain bekerja. Dengan demikian tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap kegiatan produktif.

Menurut Sastrohardiwiryo (2005: 33) dengan posisinya sebagai faktor produksi, tenaga kerja adalah salah satu unsur dari perusahaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu unsur tenaga

kerja tidak bisa dipisahkan dengan unsur lain dalam proses produksi. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal.

Maka untuk mewujudkan tujuan dari kegiatan usaha, diperlukan tenaga kerja sebagai perencana sekaligus pelaku kegiatan usaha. Meskipun pada jaman sekarang ini perusahaan lebih banyak menggunakan mesin untuk menggantikan peran tenaga kerja dalam proses produksi, hal ini tidak dapat menghapus peran penting tenaga kerja dalam keseluruhan kegiatan usaha.

Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Kuncoro (dalam Fadliilah, 2012) pengertian penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari lapangan kerja yang sudah terisi yang dapat tercemin dari jumlah penduduk yang bekerja atau dapat disebut angkatan kerja yang telah bekerja. Angkatan kerja yang bekerja tersebut terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya angkatan kerja disebabkan adanya permintaan akan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan permintaan tenaga kerja.

Menurut Tohar (2007: 10) penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya

pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja yang belum terisi merupakan kesempatan bagi semua pencari kerja untuk mengisinya dan ketika pencari kerja telah berhasil mengisinya maka lapangan kerja tersebut telah menyerap tenaga kerja.

Sudarsono (dalam Putra, 2012) penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang tersedia di satu daerah. Permintaan tenaga kerja berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan mencerminkan jumlah tenaga kerja yang akan terserap pada perusahaan tersebut.

Jadi dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini, yaitu banyaknya angkatan kerja yang bekerja atau yang mampu terserap oleh lapangan kerja. Dengan demikian, jumlah orang yang bekerja tergantung dari permintaan tenaga kerja oleh lapangan kerja yang tersedia. Sedangkan permintaan tenaga kerja oleh lapangan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah unit usaha yang tersedia. Jika jumlah unit usaha bertambah, maka permintaan tenaga kerjanya juga bertambah.

Pentingnya Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Sebagai sektor yang memiliki banyak potensi, sektor IKM dapat melakukan berbagai pemerataan salah satunya pemerataan perluasan penyerapan tenaga kerja. Menurut Partomo (2004: 13) dari semua potensi IKM, kemampuan penyerapan tenaga kerjanya merupakan potensi yang paling menonjol. Jenis IKM yang beraneka ragam, jumlahnya yang besar serta penyebarannya yang merata disemua sektor ekonomi membuat sektor ini dapat menyerap tenaga kerja secara merata.

Prabowo (dalam Woyanti, 2010) berpendapat bahwa jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu IKM meningkat maka permintaan tenaga kerjanya juga akan bertambah. Peningkatan unit usaha suatu sektor Industri Kecil Menengah (IKM) pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, kemudian penambahan lapangan kerja ini mengakibatkan permintaan tenaga kerja juga bertambah. Dengan demikian dapat disimpulkan jika semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha IKM yang berdiri maka akan semakin besar penyerapan tenaga kerjanya.

Melihat IKM mempunyai keterlibatan yang besar terhadap angkatan kerja, secara

garis besar IKM memegang peranan penting sebagai sektor yang potensial dalam penyerapan tenaga kerja. Dimana keberadaan sektor IKM disuatu daerah akan memberi kontribusi nyata dalam usaha meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat suatu perbandingan, atau tanpa menghubungkan antara satu variabel dengan yang lainnya (Sugiyono, 2010:11). Penelitian deskriptif hanya menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan yang akan berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan demikian penelitian ini hanya bertujuan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran tentang Industri Kecil Menengah (IKM) serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis statistik

deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah analisis dengan menggunakan suatu rumus-rumus statistik untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis atau kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2010: 29).

Data kuantitatif yang berupa angka-angka akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik. Untuk mengukur peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja maka data akan dianalisis dengan menggunakan rumus sederhana yang diturunkan dari rumus presentase sebagai berikut :

$$P_{ikm} = \frac{\text{TK terserap pada sub sektor IKM}}{\text{TK terserap oleh sektor ekonomi}} \times 100\%$$

Profesor Iwan Jaya Azis, (1994)

Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa persentase penyerapan tenaga kerja sektor IKM dengan cara membandingkan antara tenaga kerja yang terserap IKM dengan jumlah total tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian dapat diketahui seberapa besar peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor usaha lainnya.

Kemudian untuk mengukur peranan IKM formal dan IKM non formal dalam

total penyerapan tenaga kerja IKM digunakan rumus sebagai berikut :

$$P_{if} = \frac{\text{TK terserap pada sektor IKM formal}}{\text{TK terserap oleh sektor ekonomi}} \times 100\%$$

$$P_{inf} = \frac{\text{TK terserap sektor IKM non formal}}{\text{TK terserap oleh sektor ekonomi}} \times 100\%$$

Rumus-rumus tersebut digunakan untuk mengetahui berapa persentase penyerapan tenaga kerja sektor IKM formal dan IKM non formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo, dan mengetahui sumbangan masing-masing dalam total jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap oleh IKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Dalam penelitian telah dikumpulkan beberapa data tentang variabel-variabel penelitian menggunakan metode studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya semua data yang telah terkumpul selama penelitian dihitung dengan menggunakan rumus-rumus statistik untuk menentukan hasil dari penelitian. Yaitu mengukur besarnya peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo

Di Kabupaten Ponorogo Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peranan dalam menyerap tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang rendah. Untuk mengukur besarnya peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo maka jumlah penyerapan tenaga kerja oleh sektor IKM akan dibandingkan dengan total penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Dari perhitungan rumus tersebut diperoleh besarnya peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo selama periode 2002-2011 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Peranan IKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo periode 2002-2011

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja oleh IKM	Persentase Penyerapan TK oleh IKM (%)
2002	49.329	11,17
2003	50.512	12,43
2004	51.103	11,65
2005	51.515	11,07
2006	51.940	11,89
2007	52.467	9,94
2008	52.632	10,67
2009	52.947	10,04
2010	53.162	11,21
2011	53.337	11,79

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM(indakop)

Hasil perhitungan data menunjukkan peranan IKM dalam penyerapan tenaga

kerja mengalami peningkatan dan penurunan. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu mencapai 12,43 persen dengan jumlah penyerapan sebanyak 50.512 tenaga kerja dan peranan terendah pada tahun 2007 yaitu 9,94 persen dengan penyerapan sebanyak 52.467 tenaga kerja. Rata-rata persentase peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 11,19 persen setiap tahun yaitu sekitar 51.000 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) memberikan sumbangan sebesar 11,19 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Dengan angka 11,19 persen, sektor IKM memiliki peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian IKM berperan penting dalam upaya perluasan kesempatan kerja untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran.

Peranan IKM formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Ponorogo terbentuk dari dua jenis IKM, yaitu IKM formal dan IKM non formal. Keduanya memiliki perannya masing-masing dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, harus dihitung besarnya peranan masing-masing IKM dalam penyerapan

tenaga kerja. Untuk mengukur seberapa besar peranan IKM formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo, jumlah tenaga kerja yang bekerja di IKM formal akan dibandingkan dengan jumlah total penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh besarnya peranan IKM formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo selama periode 2002-2011 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Peranan IKM formal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo periode 2002-2011

Tahun	Jumlah penyerapan tenaga kerja IKM formal	Presentase Peranan IKM formal (%)
2002	7.215	1,63
2003	7.658	1,73
2004	7.906	1,95
2005	8.163	1,86
2006	8.430	1,81
2007	8.835	2,02
2008	8.903	1,69
2009	9.087	1,84
2010	9.184	1,74
2011	9.252	1,95

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM (indakop)

Hasil perhitungan menunjukkan penyerapan tenaga kerja oleh IKM formal mengalami peningkatan dan penurunan.

Peranan terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu mencapai 2,09 persen dengan penyerapan sebanyak 8835 tenaga kerja, dan terendah pada tahun 2002 yaitu 1,63 persen dengan penyerapan sebanyak 7.215 tenaga kerja. Adapun rata-rata persentase peranan IKM formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 1,82 persen setiap tahun yaitu sekitar 8.000 tenaga kerja. Dengan angka 1,82 persen, sektor IKM formal memiliki peranan yang kecil dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Dari total penyerapan tenaga kerja oleh IKM sebesar 11,19 persen, peranan IKM formal hanya menyumbang sebesar 1,82 persen. Sisanya merupakan peranan yang diberikan oleh IKM non formal.

Peranan IKM Non formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo

Setelah mengetahui besarnya peranan IKM formal dalam penyerapan tenaga kerja, selanjutnya dihitung besarnya peranan IKM non formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Untuk mengukur besarnya peranan IKM non formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo, jumlah penyerapan tenaga kerja oleh IKM non formal dibandingkan

dengan jumlah total penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh besarnya peranan IKM non-formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo selama periode 2002-2011 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Peranan IKM non-formal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo periode 2002-2011

Tahun	Jumlah penyerapan tenaga kerja IKM Non formal	Presentase Peranan IKM Non formal (%)
2002	42.114	9.54
2003	42.854	10.55
2004	43.197	9.85
2005	43.352	9.32
2006	43.510	9.96
2007	43.632	8.27
2008	43.729	8.87
2009	43.860	8.32
2010	43.978	9.28
2011	44.085	9.74

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM (indakop)

Hasil analisis data menunjukkan rata-rata persentase peranan IKM non-formal dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 9,37 persen tiap tahunnya. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu mencapai 10,55 persen, dan terendah pada tahun 2007 yaitu 8,27 persen. Dengan angka 9,37

persen, sektor IKM non-formal memiliki peranan yang tidak kecil dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Dari 11,19 persen peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja, sektor IKM non-formal menyumbang sebesar 9,37 persen. Peranan IKM non-formal lebih besar jika dibandingkan peranan IKM formal.

Pembahasan

Jumlah penyerapan tenaga kerja oleh IKM selalu meningkat selama periode 2002-2011. Namun dari hasil perhitungan data menunjukkan peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah total penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Rata-rata persentase peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 11,19 persen setiap tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa 11,19 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo merupakan sumbangan dari IKM, sedangkan sisanya merupakan penyerapan dari sektor ekonomi lainnya. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu mencapai 12,43 persen dengan jumlah penyerapan sebanyak 50.512 tenaga kerja dan peranan terendah pada tahun 2007 yaitu 9,94 persen dengan penyerapan sebanyak 52.467 tenaga kerja. Pada tahun 2003 jumlah total penyerapan tenaga kerja

hanya mencapai 406.232 tenaga kerja, jumlah ini menurun dari jumlah sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah penyerapan tenaga oleh sektor selain IKM mengalami penurunan. Penurunan jumlah ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya banyak tenaga kerja yang pensiun, adanya PHK, dan pengunduran diri dari karyawan untuk membentuk usaha sendiri atau mutasi kerja ke kota lain. Dan disaat yang sama penyerapan IKM tetap meningkat mencapai 50.512 tenaga kerja, oleh karena itu peranan IKM menjadi sangat besar pada tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah total penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yang besar hingga mencapai 527.879 tenaga kerja, di saat yang sama jumlah penyerapan tenaga kerja oleh IKM sebesar 52.467 tenaga kerja. Jumlah peranan IKM hanya sekitar 9,94 persen. Hal ini disebabkan jumlah penyerapan sektor ekonomi lain juga mengalami peningkatan di tahun 2007 sehingga peranan IKM mengalami penurunan. Namun disamping itu semua, secara keseluruhan IKM memiliki peranan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Hal ini juga didukung oleh pernyataan beberapa pemilik IKM sebagai nara sumber yang menyatakan IKM memiliki peranan dalam menyerap tenaga kerja di daerah mereka. Seperti pernyataan

yang diberikan oleh salah satu pemilik industri roti di Desa Kalimalang.

“Ya banyak Mbak. Dulu waktu belum banyak yang membuat roti, semua orang di desa ini pergi keluar negeri jadi TKI. Soalnya di rumah menganggur, tidak ada pekerjaan adanya kerja serabutan. Tapi setelah banyak warga yang buka usaha roti, banyak warga yang ikut kerja di usaha itu.”(Sujarmiati, Wawancara 25 Juli 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika keberadaan IKM memiliki peranan yang penting dalam penyerapan tenaga kerja di Desa Kalimalang. Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik IKM lainnya juga menyatakan bahwa IKM memiliki peran yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di daerah sekitarnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori klasik yang menyatakan jika IKM berperan penting dalam proses industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja.

Dari total penyerapan tenaga kerja oleh IKM sebesar 11,19 persen, peranan IKM formal menyumbang 1,82 persen dan sektor IKM non-formal menyumbang sebesar 9,37 persen. Peranan IKM non formal dalam penyerapan tenaga kerja lebih besar daripada IKM formal. Hal ini menunjukkan jika IKM formal belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Melihat pada data dari Dinas Indakop Kabupaten Ponorogo serta hasil

observasi dilapangan, peranan IKM non formal lebih besar dikarenakan jumlah unit usaha IKM non formal lebih banyak daripada jumlah IKM formal. Sehingga peningkatan penyerapan tenaga kerjanya pun lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Prabowo (2010) berpendapat bahwa jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja.

Menurut Sutaji (Wawancara, 26 Juli 2013) masyarakat lebih banyak membentuk IKM non-formal, karena selain mengurus surat ijinnya terlalu rumit, modal yang mereka miliki hanya cukup untuk membentuk industri dengan skala kecil yang tidak harus memiliki ijin usaha. Berbeda dengan industri formal yang mayoritas adalah industri menengah dengan wilayah pemasaran yang lebih luas sehingga memerlukan ijin usaha. Pernyataan ini di dukung oleh pernyataan Parman (Wawancara, 25 Juli 2013) yang menyatakan jika modal yang digunakan oleh para pemilik IKM adalah modal pribadi. Industri kecil Menengah (IKM) yang menggunakan modal pinjaman sangat sedikit jumlahnya. Hal inilah yang menyebabkan jumlah industri non formal lebih banyak jumlahnya daripada industri formal. Meskipun demikian, peranan IKM formal tidak dapat diabaikan, karena penyerapan tenaga kerja per unit usahanya lebih banyak jika dibandingkan dengan

penyerapan tenaga kerja per unit usaha IKM non-formal.

Jumlah IKM formal yang lebih kecil menyebabkan jumlah pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh IKM tidak secepat peningkatan jumlah unit usahanya. Karena peningkatan jumlah unit usaha IKM lebih didominasi IKM non-formal yang mayoritas merupakan industri dengan skala kecil, menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerjanya tidak maksimal. Karena industri dengan skala kecil di Kabupaten Ponorogo hanya mampu menyerap 1-5 tenaga kerja per unit usahanya. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan jumlah IKM formal di kabupaten Ponorogo. Namun secara keseluruhan dengan peranan sebesar 11,19 persen menunjukkan IKM di Kabupaten Ponorogo memberikan peranan yang cukup besar dalam upaya menciptakan kesempatan kerja.

Besarnya angka peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja, membuktikan bahwa sektor ini merupakan sektor yang tepat untuk dikembangkan dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Dengan potensinya dalam menyerap tenaga kerja, menunjukkan sektor ini memiliki kemampuan untuk mengurangi pengangguran jika dikelola dengan baik. Selain itu, pada saat jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan, jumlah penyerapan

tenaga kerja oleh IKM tetap meningkat. Hal ini menunjukkan jika penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja hanya terjadi disektor-sektor ekonomi lain selain IKM. Dengan demikian selain memiliki peranan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, IKM juga memiliki kemampuan untuk tetap menyerap tenaga kerja disaat penyerapan tenaga kerja sektor-sektor ekonomi lain mengalami penurunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan :

Rata-rata persentase peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 11,19 persen tiap tahunnya. Dengan demikian IKM berperan penting dalam upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran dan merupakan sektor yang potensial dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jika sektor IKM dikembangkan dengan baik, maka kesempatan kerja yang tercipta pun semakin banyak sehingga penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo akan meningkat. Sedangkan jumlah pertambahan penyerapan tenaga kerja IKM hanya sedikit karena dari total pertambahan jumlah unit usaha IKM lebih didominasi oleh jumlah unit usaha IKM

non-formal yang penyerapan tenaga kerja per unit usahanya lebih kecil daripada IKM formal. tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo. Meskipun demikian IKM formal tidak dapat diabaikan, karena penyerapan per unit usahanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja per unit usaha IKM non-formal.

Saran

1. Peranan IKM dalam penyerapan tenaga kerja di kabupaten Ponorogo cukup besar namun belum maksimal karena jumlah angkatan kerja yang bekerja tetap menurun. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi yang lain. Oleh karena itu sektor IKM harus dikembangkan agar jumlah unit usahanya lebih banyak.
2. IKM formal harus lebih dikembangkan karena penyerapan per unit usahanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja per unit usaha IKM non-formal. Sehingga total penyerapan tenaga kerja oleh IKM dapat lebih meningkat. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan modal untuk pemilik industri kecil sehingga dapat mengembangkan usahanya

menjadi industri menengah atau memperluas wilayah pemasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.(Edisi Keempat)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur tahun 2006 : Data Makro Sosial dan Ekonomi Timur Tahun 2002-2006*. Surabaya: Pemerintah dan BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Analisa Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi Dan Sosial Jawa Timur Tahun 2007 : Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2003-2007*. Surabaya: Pemerintah dan BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Data Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur Tahun 2007-2011 : Pengukuran Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2009-2014*. Surabaya: Pemerintah dan BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Ponorogo Dalam Angka 2012* . Ponrogo : Pemerintah dan BPS Ponorogo
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Ponorogo. 2012. *Laporan Pendataan Insdustri Kecil Menengah Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo
- Fadliilah, Diah Nur. 2012. Diponegoro Journal Of Economics : *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi Kasus di Sentra Industri Kecil Ikan Asin di Kota Tegal)*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-13. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

- (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme> diakses 30 Desember 2012)
- Misbach, Muzamil. 2011. *Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja*. (<http://economicsjournal.blogspot.com/2011/12/pengertian-tenaga-kerja-dan-angkatan.html> diakses 23 Desember 2012)
- Partomo, Tiktik Sartika dkk. 2004. *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putra, Riky Eka. 2012. *Economics Development Analysis Journal : Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. *EDAJ 1 (2) (2012)*. Ekonomi Pembanguna fakultas Ekonomi Universitas Semarang. (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> di akses 23 maret 2013)
- Rejekiingsih, Tri Wahyu. 2004. *Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dalam Perekonomian di Jawa Tengah*. *Vol 1 No 2 desember 2004*. ([http://eprints.undip.ac.id/14001/1/Mengukur_Besarnya_Peranan_Industri_Kecil....by_Tri_Wahyu_Rejekiingsih_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/14001/1/Mengukur_Besarnya_Peranan_Industri_Kecil....by_Tri_Wahyu_Rejekiingsih_(OK).pdf) diakses 23 Desember 2012)
- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Simanjuntak, J Payaman. 2005. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar : Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Rajawali Press
- Teguh, Muhammad. 2010. *Ekonomi Industri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tohar, M. 2007. *Membuka Usaha Kecil (cetakan 7)*. Jakarta: Kanisius
- Wijono, Sutarto. 2010. *Psikologi Industri dan Organisasi : Dalam Suatu Bidang Gerak Psikologi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Wuri, Josephine dan Yuliana Rini Hardanti. 2006. *Peranan Industri Kecil Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat : Studi Kasus Pada Industri Kerajinan Batik Kayu di Dusun Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul*. *KINERJA, Volume 10, No.2, Tahun 2006*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (<http://www.uajy.ac.id/jurnal/kinerja/Vol10-No.2-2006/Article-5-V10-N2-06.pdf> di akses 12 Januari 2013)